



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**PANJA EVALUASI PENDIDIKAN TINGGI (EVALUASI DIKTI) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Ketua STIMIK AKI Pati; 2. Rektor Universitas Garut; 3. Rektor Universitas Pancasakti Tegal; 4. Rektor Universitas Batanghari Jambi; dan 5. Rektor Universitas Pekalongan.
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Maret 2018
Pukul	: 14.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi. 2. Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi. 3. Capaian dan Permasalahan Pendidikan Tinggi. 4. Masukan dan Usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi.
Hadir Anggota Panja	: 18 orang dari 27 Anggota Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI.
Hadir PTS	: 1. Listiarni Edy Sudiati, M.Kom., Ketua STIMIK AKI Pati; 2. Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, Rektor Universitas Garut; 3. Dr. Muntoha Nasuha, M.Pd., Wakil Rektor III Universitas Pancasakti Tegal; 4. H. Fachruddin Razi, S.H, M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi; 5. H. Suryani, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Pekalongan.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.40 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari H. Fachruddin Razi, S.H, M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi; Dr. Muntoha Nasuha, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Pancasakti Tegal; Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, Rektor Universitas Garut; Listiarini Edy Sudiati, M.Kom., Ketua STIMIK AKI Pati; dan H. Suryani, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Pekalongan, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Universitas Batanghari Jambi.

1. Rektor Universitas Batanghari Jambi menyampaikan paparan mengenai Kebijakan, Target, Sasaran Strategis, Capaian dan Permasalahan Pendidikan Tinggi serta Masukan dan Usulan untuk Pendidikan Tinggi sebagaimana **terlampir**.
2. Kendala, permasalahan dan usulan yang disampaikan oleh Universitas Batanghari Jambi antara lain mengusulkan kepada Pemerintah untuk membantu pemenuhan kelengkapan Sarpras PTS, khususnya perlengkapan laboratorium Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, Listrik, dan Pertanian.
3. Masukan, pendapat dan usulan untuk perbaikan pengelolaan Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - a) Mempermudah persyaratan publikasi jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/paten/karya monumental yang dibebankan kepada dosen dengan fungsional lektor kepala dan guru besar sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
 - b) Meninjau kembali perbedaan bantuan Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya terkait Beasiswa Bidikmisi.
 - c) Meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa baru PTN sebagaimana disampaikan Pemerintah pada Rembuk Nasional APTISI November 2017.
 - d) Meminta Pemerintah agar tidak membedakan PTN dan PTS terkait pembukaan Prodi baru, khususnya terkait Prodi Pendidikan Profesi Insinyur
 - e) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Kemenristekdikti RI, yaitu agar:
 - 1) mengubah batasan umum penerima beasiswa doktor dari usia 50 menjadi 53 tahun.
 - 2) menambah dan memperkuat asesor BAN PT, dengan merubah syarat asesor dosen yang berasal dari Prodi berakreditasi A ke Prodi berakreditasi B.
 - 3) meningkatkan jumlah dan penerima Beasiswa Bidikmisi (untuk orang miskin) di PTN maupun PTS.
 - 4) menyusun Skema Pendanaan yang inovatif dengan pengembangan kemitraan Pemerintah, Universitas dan Industri.
 - 5) menghidupkan kembali skema-skema bantuan ke PTS dari Pemerintah, seperti PHP PTS.

- f) Mengusulkan kepada Pemerintah agar pada pembukaan Prodi baru yang mensyaratkan adanya 6 dosen linear dirubah menjadi 4 dosen linear dan 2 dosen non-linear (dalam satu rumpun ilmu).
- g) Mengusulkan kepada Pemerintah agar persyaratan PPG tidak terlalu memberatkan bagi calon guru.

B. Universitas Pancasakti Tegal.

- 1. Wakil Rektor III Universitas Pancasakti Tegal menyampaikan materi RDPU dengan Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI, sebagaimana **terlampir**.
- 2. Wakil Rektor III Universitas Pancasakti menyampaikan kendala dan permasalahan sebagai berikut:
 - a) Kesamaan program studi yang diselenggarakan oleh PTN dan PTS dalam satu daerah menyebabkan munculnya persaingan yang kurang sehat.
 - b) Pemerintah tidak tegas terkait merger PTS yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 orang.
 - c) Implementasi KKNi terkait kemampuan kerja, belum mampu mengikuti perkembangan pasar kerja.
 - d) Pemberlakuan 9 (sembilan) standar akreditasi institusi per-1 Januari 2018, belum dilakukan sosialisasi.
 - e) Ada ketidakadilan dalam pemberlakuan akreditasi A, B dan C.
 - f) Hilangnya kebijakan bantuan Sarpras dan fasilitas belajar mengajar untuk pengembangan minat, bakat dan keilmuan mahasiswa melalui hibah.
 - g) Permasalahan umum lain, terkait implementasi kerjasama PT, peran dan fungsi KOPERTIS, dan rencana masuknya PT Luar Negeri.
- 3. Masukan, pendapat dan usulan untuk perbaikan pengelolaan Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - a) Birokrasi penilaian usulan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar, sebaiknya menggunakan aplikasi teknologi yang mampu diakses oleh seluruh PT di Indonesia.
 - b) Perlu pembinaan dan sanksi tegas atas akuntabilitas PTS yang badan hukum penyelenggaraannya bukan dimiliki oleh perorangan.
 - c) Mengusulkan adanya Standar Pendidikan per-Program Studi.

C. Universitas Garut.

- 1. Rektor Universitas Garut menyampaikan paparan tentang Kondisi Perguruan Tinggi di Kabupaten Garut, sebagaimana **terlampir**.
- 2. Kondisi, kendala, permasalahan dan usulan yang disampaikan oleh Universitas Garut antara lain:
 - a. berada pada peringkat ke-207 se-Indonesia dan telah mendapatkan akreditasi institusi B dari BAN-PT pada tahun 2005.
 - b. masih terdapat dosen dan tenaga pengajar yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (masih Strata-1), belum memiliki jabatan akademik, minim dosen S-3 dan guru besar, dan minim HAKI.
 - c. Mengusulkan jumlah kenaikan anggaran Bidikmisi dan PPA, serta kenaikan unit cost pada BOPTN untuk PTS.

3. Masukan, pendapat dan usulan untuk perbaikan pengelolaan Pendidikan Tinggi, antara lain Pemerintah perlu mengantisipasi dan mencegah kasus ijazah palsu melalui:
 - 1) Penyediaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sebagai akun yang dapat mengakses alamat situs resmi ristekdikti.
 - 2) Penyediaan sistem verifikasi keabsahan ijazah (SIVIL) yang dikeluarkan PT.

D. STIMIK AKI Pati.

1. Ketua STIMIK AKI Pati menyampaikan paparan tentang Informasi, Profil, Visi-Misi, Strategi, Analisis SWOT, saran dan Masukan sebagaimana **terlampir**.
2. Kendala, permasalahan dan usulan yang disampaikan oleh STIMIK AKI Pati antara lain:
 - a. Sebagian besar lulusan SLTA dengan kemampuan akademik dan ekonomi menengah keatas cenderung melanjutkan studi di PT di ibukota provinsi, sehingga mahasiswa yang masuk STIMIK AKI cenderung berkemampuan menengah ke bawah.
 - b. Terdapat PT yang membuka kelas jauh di Pati dan tidak sesuai dengan ketentuan.
 - c. Minimnya perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah setempat, khususnya tidak ada tunjangan untuk dosen sebagaimana ketentuan pasal 57 dan 59 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - d. Regulasi yang mengatur calon PNS minimal harus berasal dari PT terakreditasi B dan aturan penyatuan PTS berdasar Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, menjadikan masyarakat kurang memiliki minat untuk kuliah di PTS kecil.
3. Masukan, pendapat dan usulan untuk perbaikan pengelolaan Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian dan pembinaan terhadap PTS di wilayahnya, antara lain dengan merealisasikan Pasal 57 dan 59 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - b. Kemenristekdikti RI perlu memberikan perhatian lebih terhadap PT yang berada pada klaster 5 dan 4, termasuk kemudahan mendapatkan hibah..
 - c. Mengusulkan agar program kelas jauh atau program di Luar Domisili Kampus ataupun Program Multi Kampus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Universitas Pekalongan.

1. Rektor Universitas Pekalongan menyampaikan paparan mengenai Transformasi Pendidikan Tinggi pada Era Revolusi Industri 4.0 sebagaimana **terlampir**.
2. Universitas Pekalongan menyampaikan masukan, pendapat dan usulan untuk perbaikan pengelolaan Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - a) Alokasi dana hibah PTN dan PTS sebaiknya diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah PT supaya asas pemerataan terpenuhi.
 - b) Terkait relevansi kualitas dan kuantitas SDM Dikti:
 - a. Perlu ada kebijakan yang lebih memberikan kesempatan bagi PT yang terakreditasi untuk memperoleh akreditasi jurnal ilmiah.

- b. Kemenristekdikti perlu memberikan peluang pendanaan yang lebih proporsional dan sebanding dengan lembaga lain, seperti LPDP dari Kementerian Keuangan.
 - c. Mengusulkan adanya subsidi anggaran bagi akreditasi melalui LAM PT Kes.
- c) Pembelajaran dan kemahasiswaan:
- a. Pemerintah perlu mengevaluasi pemberian izin PTN yang menyelenggarakan PSDKU di daerah yang padat PT, dengan memperhatikan daerah-daerah 3T.
 - b. Pemerintah perlu mengkaji syarat pendirian program profesi agar tidak selalu diselenggarakan hanya oleh program profesi terakreditasi A.
 - c. Pemerintah hendaknya tidak mengekang kebebasan dalam memilih standar pengelolaan PT, sehingga pengakuan kualitas tidak hanya berdasar pada penilaian BAN-PT namun dapat berdasar standar yang diakui dunia seperti AUN-QA, AQF-QA, dan ABET.

F. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI.

1. Apresiasi terhadap paparan dan masukan dari Universitas Batanghari Jambi, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Garut, STIMIK AKI Pati, dan Universitas Pekalongan, sebagai bagian referensi pengambilan kebijakan.
2. Mendesak Kemenristekdikti RI kepada PTN dalam melakukan pembukaan program kelas jauh, Program Studi di Luar Domisili Kampus atau Program Multi Kampus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan PTS di daerah.
3. Meminta PTS untuk menyampaikan pandangan tertulis mengenai beberapa hal:
 - a. Upaya pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa di PTS.
 - b. Upaya PTS dalam mencapai *World Class University*.
 - c. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
 - d. Status dosen dan tenaga kependidikan PNS dan Non PNS di PTS.
 - e. Penyusunan kurikulum harus selaras dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8.
4. Mendorong PTS untuk menyampaikan kajian mengenai perlunya:
 - a. Peninjauan kembali moratorium pengangkatan PNS, khususnya untuk dosen dan tenaga kependidikan di PTS.
 - b. Perubahan Kopertis menjadi L2Dikti sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Adanya regulasi tentang Standar Pendidikan per-Program Studi.
 - d. Tinjauan hal-hal penting dalam rangka pemajuan mutu pendidikan tinggi.

5. Meminta PTS untuk menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada angka F.3 dan F.4 dalam bentuk tertulis paling lambat 26 Maret 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.33 WIB

KETUA RAPAT.



FERDIANSYAH, S.E., M.M.

